

BUKTI BARU

Abdullah Rasyid : Visa Turis, Judi Online, dan Generasi yang Terancam, Alarm Kedaulatan Digital Indonesia

Updates. - BUKTIBARU.COM

May 19, 2026 - 08:47



OPINI - Ketika Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa 200 ribu anak Indonesia, termasuk 80 ribu di bawah usia 10 tahun, telah terpapar judi online, publik tersentak. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret rapuhnya benteng digital bangsa. Judi online bukan hiburan, melainkan scam sistematis yang merusak ekonomi keluarga, memicu KDRT, dan menghancurkan

masa depan generasi muda.

Namun dimensi ancaman ini jauh lebih kompleks. Penangkapan 321 WNA di Jakarta dan 210 WNA di Batam pada awal Mei 2026 memperlihatkan bahwa celah Visa Turis, Bebas Visa Kunjungan (VBK), dan Visa on Arrival (VoA) telah dimanfaatkan sindikat internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai basis operasi digital.

Ilusi "Aman" Karena Visa Sah

Selama ini kita terjebak dalam pola pikir lama: kalau visanya sah, berarti dia aman. Padahal, kejahatan transnasional abad ke-21 tidak lagi menembus pagar kawat berduri, melainkan menyusup lewat dokumen perjalanan yang sah. Sistem imigrasi kita mendeteksi status hukum, bukan niat kriminal. Celah inilah yang dieksploitasi sindikat internasional, diperparah oleh keterbatasan pengawasan lapangan akibat rasio petugas yang tidak sebanding dengan lonjakan arus orang.

Fakta Terbaru: Skala Ancaman

- Situs diblokir Kominfo: lebih dari 3,2 juta situs hingga Mei 2026.
- Perputaran dana PPATK: Rp 40,3 triliun hanya dalam kuartal I 2026, dengan prediksi bisa menembus Rp 1.100 triliun sepanjang tahun.
- Anak terpapar: 200 ribu anak, termasuk 80 ribu di bawah usia 10 tahun.

Data ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya kriminal, melainkan fiskal, sosial, dan kedaulatan digital.

Dari Reaktif ke Proaktif: Agenda Kebijakan

1. Revitalisasi Wajib Laport Digital: WNA pemegang visa jangka pendek wajib check-in lokasi atau aktivitas setiap 14 hari melalui aplikasi.
2. Hukuman berat fasilitator lokal: Pemilik gedung, apartemen, atau penyedia internet yang memfasilitasi WNA ilegal dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.
3. Diplomasi imigrasi tegas: Evaluasi ulang perjanjian bebas visa dengan negara yang berulang kali muncul dalam kasus judul.
4. Integrated immigration intelligence: Integrasi data imigrasi, keuangan, dan digital lintas lembaga (Polri, PPATK, BIN, Komdigi).
5. AI dan big data: Deteksi anomali sejak dini: kedatangan massal dengan sponsor sama, pola tinggal tertutup, transaksi digital mencurigakan.

Kedaulatan Ada di Tangan Kita

Penangkapan ratusan WNA bukan alasan untuk panik, melainkan untuk sadar: perang modern tidak selalu menggunakan tank, tapi kode program dan penyalahgunaan regulasi.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, di bawah arahan Presiden Prabowo, berkomitmen bertransformasi dari sekadar "stempel paspor" menjadi penjaga gerbang keamanan nasional yang cerdas, tegas, dan berbasis data.

Kepada masyarakat, kami mengajak partisipasi aktif. Anda adalah mata dan telinga kami. Jika melihat tetangga asing yang mencurigakan, tidak pernah keluar, banyak tamu datang tengah malam, atau aktivitas server yang aneh, laporkan. Karena keamanan Indonesia bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab bersama.

Jakarta, 19 Mei 2026

Abdullah Rasyid

*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN